SINOPSIS

Desa Kradenan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Trucuk, Klaten yang pada periode 2007 mendapatkan alokasi anggaran Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan di tingkat desa. Salah satu pertimbangan utama dipilihnya desa tersebut adalah masih banyaknya keluarga di Desa Kradenan, yang termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yaitu sebesar 472 KK atau sekitar 41% dari keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut, khususnya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya bahwa data tentang masalah penelitian disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara teliti dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten tahun 2007 telah berjalan sesuai dengan rencana yang dirumuskan dalam Musyawarah Antar Desa. Pada PPK periode ini, Desa Kradenan mendapatkan alokasi anggaran Rp 34.675.000, untuk kegiatan pembangunan talud jalan sepanjang 350 m dengan menyerap tenaga kerja 379 HOK dan angkatan kerja 15 orang (10 orang RTM) dan untuk kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan diberikan kepada 9 orang (2 orang RTM). Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kedua kegiatan PPK di atas adalah terletak pada pencairan dana yang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga sedikit menghambat kelancaran kegiatan PPK. Untuk mengatasi masalah tersebut, Tim Fasilitator PPK yang telah ditunjuk atas kesepakatan dengan warga segera mengajukan permasalahan tersebut di tingkat Kecamatan untuk segera ditindaklanjuti.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten tahun 2007 yang diimplementasikan dalam dua bentuk kegiatan di atas tidak serta merta mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat di desa tersebut. Sebab program pengentasan kemiskinan bersifat terpadu dan berkelanjutan seiring dengan kompleksitas masalah kemiskinan itu sendiri. Pada prinsipnya PPK yang dilaksanakan oleh pemerintah lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan dan memotivasi masyarakat desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dilihat dari variabel kritis implementasi kebijakan dapat dikatakan bahwa kegiatan PPK ini telah memenuhi empat variabel : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.